

RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh pegawai DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



ARIK KRISDIANTO, S.STP, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR IS.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	8
TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	8
 Strategi Pemecahan Masalah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun	29
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	33
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP	33
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP	34
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	35
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	36
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2026.....	38
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2. Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun	64
3.3. Program dan Kegiatan.....	66
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN.....	82
BAB V PENUTUP.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah

dicapai sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun pertama periode Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2026, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Di tahun 2025, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029. DPMPTSP Kabupaten Madiun menindaklanjuti hal tersebut dengan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. Selanjutnya diikuti dengan penyusunan dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 -2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2024. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2026.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Evaluasi hasil pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 total anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebesar Rp. 6.424.264.753,- dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 6.155.654.598,- atau 95,82% dari. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yaitu 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program fungsional tersebut, dalam pelaksanaan program telah memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Sakip Perangkat Daerah	81 Nilai	84,23 Nilai	103,99%
Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	86 Nilai	86,13 Nilai	100,15%
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60,94 Nilai	78,80 Nilai	129.31

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.186.445	30.184.500	99,99%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.186.445	30.184.500	99,99%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.775.890.967	3.728.833.892	98,75%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.452.535,75	506.561.081	98,47%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.517.757,29	13.515.950	99,99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.876.019	128.159.420	98,68%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.670.963	32.557.100	99,65%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.485.480	12.388.000	99,22%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.698.000	306.808.111	110,50%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.204.316	13.132.500	99,46%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.564.942	115.850.000	97,71%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.564.942	115.850.000	97,71%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.566.489	667.611.429	96,26%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	245.580.022	228.737.972	93,14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	447.986.467	438.873.457	97,97%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.697.347	267.312.425	99,48%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.717.500	154.980.865	99,53%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.979.847	40.671.560	99,25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000	71.660.000	99,53%

2. Realisasi Program/Kegiatan fungsional urusan Penanaman Modal

a) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah Investor</i>	12.500 Perusahaan	22.859 Perusahaan	182,87%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	17.401.000	15.195.350	87,32%
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5.410.000	3.673.350	67,90%
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	11.991.000	11.522.000	96,09
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	98.600.000	96.886.600	98,26%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	98.600.000	96.886.600	98,26%

b) Program Promosi Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah Investor baru</i>	1.000 Perusahaan	5.250 Perusahaan	525%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.190.000	56.224.000	94,99%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	59.190.000	56.224.000	94,99%

c) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</i>	89 Nilai	90,57 Nilai	101,76%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	165.973.000	165.161.500	99,51%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.970.000	59.597.700	99,38%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	106.003.000	105.563.800	99,59%

d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)</i>	150 Perusahaan	475 Perusahaan	316,67%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	580.092.000	405.082.017	69,83%
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	76.451.800	8.172.500	10,69
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usah	331.868.676	285.039.517	85,89%
Pengawasan Penanaman Modal	171.771.524	111.870.000	65,13%

c) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal,
dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<i>Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi</i>	<i>86 Nilai</i>	<i>86,05 Nilai</i>	<i>100,06</i>

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.650.027	100.751.804	99,12
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	101.650.027	100.751.804	99,12

Permasalahan

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam

lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Strategi Pemecahan Masalah

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal</i>	100%		90	100%	111%			
	<i>Jumlah Investor (Perusahaan)</i>			12.500	22.859	182,87	29000	59342	
	<i>Indeks Kualitas Iklim Penanaman Modal (Nilai)</i>						4	0	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan (%)</i>		100%	90	100%	111%	100%	100%	100%
	<i>Jumlah penetapan pemberian fasilitas/ insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku (dokumen)</i>	-	-	-	-	-	1		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100%
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemkab/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>			5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			89 Nilai	90,57 Nilai	101,76 %	91 Nilai	91,5	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan MPP						90 Nilai		
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	84%	80%	82%	102,5%	83%	85%	
	Jumlah kunjungan loket di MPP						60000 orang	52006	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>		2.789 Pelaku Usaha	4.000 Pelaku Usaha	2.143 Pelaku Usaha	53.58 %	3.000 Pelaku Usaha	1315	-
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang/Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		2050	1100 Pelaku usaha	2093 Pelaku usaha	190.27%	2500 Pelaku Usaha	2235	
Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen		
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	6,4 T	7,360 Triliyun	-	-	-	-		
	Jumlah investor baru (Perusahaan)			1000	5.250	525%	1000		
	Jumlah Minat Penanaman Modal (Minat)						5	4	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal			9 Minat	5 Minat	55,56%	5 Minat	4	
	Persentase Fasilitasi Minat Investasi yang dilaksanakan			-	-	-	100%	100%	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiat an promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		-3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	1 Dokumen	1 Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	72%	-	-	-	-		
	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)			150 Pel;aku Usaha	475 Pelaku Usaha	316,67%	475 Pelaku Usaha	333	
	Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku						57 %	48.73%	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	174 kali	59%						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya			125	375	300%	130 Pelaku Usaha	333	
	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal						475 Pelaku Usaha		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	300 unit	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	350 unit	590 Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	300 unit	349 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku			10 Kegiatan Usaha	26 Kegiatan Usaha	260%	10 Kegiatan Usaha	15	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			400 Pelaku Usaha	511 Pelaku Usaha	127,25%	-	-	-
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			15 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	66,67%	15 Kegiatan Usaha	22	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	99,34%	10%	99,34%	993,38 %			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi			86 Nilai	86,05 Nilai	100.06 %	87 Nilai	90.37	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000 layanan	3.226	20.000 Kali	21.409 Kali	107,05%	20.000 Kali		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan		-	20000 kali	21409 kali	107.05 %	20000 kali	1565	-
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
	<i>Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu</i>						100%	100%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	83,49 (A)	81 (A)	84,23 (A)	103,99 %	81,5 (A)		
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)	86,03 (A)	86 (A)	86,03 (A)	100,15 %	87 (A)		
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal			60,94	78,80	129.31 %	66,34		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	25 dok	25 dok	25 dok	25 dok	100%	25 dok	24	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	5 Paket	100%	5 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	100%	3 Paket	100%	3 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	3 Paket	100%	3 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi Jumlah Laporan Penyeleng- garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	135 laporan	100%	135 laporan	135%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana pendukung yang diadakan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</i>		10 Unit		10 Unit	100%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	11 unit	-	4 unit	-	-	4 unit	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	12 Laporan	100%	12 Laporan	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	100%	- 12 Laporan	100%	- 12 Laporan	- 100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik <i>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</i>	100%	10 Unit	100%	10 Unit	91%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara <i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	100%	60	100%	60	120%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (2024)			Target program / kegiatan Tahun 2025 (berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisas Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10
1	2	3	6	8	6	7=(6/5)	8	9	10
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	85%	100%	85%	85%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	25 dok	25 Dokumen	25 dok	25r Dokumen	100%	15 dok	10 dok	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- d. Mengkoordinir pengelolaan Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis layanan publik di satu pintu mulai layanan perizinan,

kependudukan dan pencatatan sipil, ketenagakerjaan, perpajakan, keimigrasian, BPJS, perbankan dan lain sebagainya.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Tim Kerja dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Madiun
Tahun 2020-2024 (TC 30)

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	15	17	18	19	20	20
1	Indeks kepuasan masyarakat /IKM	-	-	-	81	84	86	89	89	82,32	84,76	86,53	91,21	90,57	101,63	100,9	100,62	102,48	102,48
2	Minat Investasi (Rupiah)	-	-	-	310 M	1,4 T	1,5 T	1,6 T	-	1,29 T	1,98 T	4 T	7,36 T	-	416,26	141,93	266,86	460,04	-
3	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	500 M	900 M	1 T	1,1 T	2,2 T	889,81 M	1,1 T	1,825 T	1,825T	2,3 T	177,96	123,97	182,31	165,97%	104,57%
4	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan PTSP	-	-	-	-		84		86	-	-	84,88	-	93,252	-	-	-	-	106,23% -

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPSTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPSTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.
3. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.

4. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
5. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun maka telah disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029 dimana di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Madiun sesuai RPJMD 2025-2029 berpusat pada visi "Madiun Bersahaja" (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). Dokumen strategis ini memuat enam tujuan utama sebagai.

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan terpercaya Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2. Menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas, berkeadilan, dan merata.
5. Mewujudkan stabilitas sosial dan menekan tingkat kemiskinan secara signifikan.
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah terhadap bencana.

Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran daerah pada Tujuan 1 (satu) yaitu terkait Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya dengan sasaran Meningkatkan Layanan Publik yang Berkualitas dengan cara meningkatkan layanan publik yang berkualitas memiliki substansi meningkatkan pelayanan publik dasar yang diterima oleh masyarakat melalui inovasi pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, dan peningkatan kualitas SDM. dan Tujuan 4 (empat) yaitu Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Daerah dengan Sasaran fokus pada peningkatan realisasi investasi yang mencerminkan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan pro-investasi, seperti penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan industri terpadu, dan pemberian insentif bagi investasi padat karya. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menarik modal asing dan domestik, tetapi juga untuk memperluas lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan kondisi demikian, maka indikator yang relevan dalam mencerminkan ketercapaian sasaran pembangunan pertama adalah nilai realisasi investasi. Salah satu indikator sasaran daerah untuk mendukung tujuan tersebut adalah Nilai Realisasi Investasi dimana capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkat setiap tahunnya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun

- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Negara-negara tetangga Asean memberikan insentif yang lebih menarik sehingga dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, insentif perpajakan di Indonesia relatif lebih rendah.
- 4) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 5) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- 7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri

- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2026

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan
3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik
4. Pelaksanaan promosi investasi yang inovatif, efektif dan tepat sasaran

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD DPMPTSP Kabupaten Madiun dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
DPMPTSP Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.802.248.638,00					7.011.558.942,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 (A)	6.151.717.744,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,3 (A)	7.011.558.942,00	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)				Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	87,3		
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	71,74				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	79,5		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	95%	1.799.900,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	90%	0,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	1.799.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	0,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	4.552.248.638,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	4.552.248.638,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.552.248.638,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4.552.248.638,00	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi	- 90%	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Madiun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Madiun	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	20.000.000,00	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Madiun	Persentase tersedianya layanan administrasi umum Persentase tersedianya layanan administrasi umum	95%	357.656.997,87	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum Persentase tersedianya layanan administrasi umum	95 %	421.917.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	105.754.571,87	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.560.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	10.425.426,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	20.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	196.917.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	196.917.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	10.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	15.000.000,00	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	269.243.780,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	196.995.198,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	87.243.780,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	87.684.894,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 unit	182.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 unit	109.310.304,00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	750.328.428,13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	750.398.106,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	263.455.434,30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	263.702.282,43	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	486.872.993,83	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	486.695.823,57	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95%	220.440.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	95%	220.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	130.440.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	165.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 unit	55.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	25000 Perusahaan	71.339.900,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor	14500 Perusahaan	113.413.000,00	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	90%	8.842.400,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan	90%	37.863.000,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	2.848.400,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	7.893.000,00	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 dokumen	5.994.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 dokumen	29.970.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	1 Proyek	62.497.500,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan	1 Proyek	75.550.000,00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	62.497.500,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	75.550.000,00	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	1000 Perusahaan	96.126.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Jumlah Investor baru	1000 Perusahaan	149.308.000,00	
3.1	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	11 Minat	96.126.000,00	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Minat Penanaman Modal	11 Minat	149.308.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	0,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 dokumen	0,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	96.126.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	149.308.000,00	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90 Nilai	132.049.200,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	90 Nilai	197.279.000,00	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	85%	132.049.200,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	85%	197.279.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.049.200,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2D dokumen	7.560.000,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4000 Pelaku Usaha	90.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Pelayanan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	169.719.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Perusahaan	35.000.000,00	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Madiun	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1200 Perusahaan	20.000.000,00	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	160 Perusahaan	250.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	160 Perusahaan	250.000.000,00	
5.1	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	135 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya	135 Pelaku Usaha	250.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany	10 Kegiatan Usaha	66.298.000,00	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Madiun	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany	10 Kegiatan Usaha	66.298.000,00	Perubahan Nomenklatur dan Indikator

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	135 Kegiatan Usaha	183.702.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	135 Kegiatan Usaha	183.702.000,00	Perubahan Nomenklatur dan Indikator
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	88	101.015.794,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Nilai kepuasan masyarakat atas layanan data dan informasi Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	88	140.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	6500 kali	101.015.794,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	6500 kali	140.000.000,00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	101.015.794,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	15 dokumen	140.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2026 yang tertuang di dalam RPD 2025-2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- a) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- b) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- c) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- d) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 tahun dan dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diwujudkan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ini menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinyamasing-masing.

RPJP Nasional Tahun 2025-2045 disusun dengan menganalisis potensi perubahan pada periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, antara lain perubahan pada demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa. Melalui analisis tersebut, upaya-upaya transformatif dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Visi Indonesia Emas 2045.

Visi Indonesia 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan



Visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang **Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

- Bersatu

Pada Tahun 2045, NKRI akan memiliki kesatuan yang lebih kuat di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sesuai dengan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun memiliki keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua elemen tersebut akan dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang lebih kokoh.

- Berdaulat

Pada Tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai NKRI yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

- Maju

Pada Tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi negara beradab, berkarakter, berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

- Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi dan berkualitas, seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu

- (1) pendapatan per kapita setara negara maju,
- (2) kemiskinan menuju 0 persen dan menurunnya ketimpangan,

- (3) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional,
- (4) meningkatnya daya saing sumber daya manusia,
- (5) intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih



Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis tersebut adalah:

1. **Peningkatan Realisasi Investasi:** Mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029, dengan investasi sebagai kontributor utama.

2. **Hilirisasi:** Mendorong investasi di sektor hilirisasi untuk memberikan nilai tambah ekonomi.
3. **Peningkatan Kualitas SDM:** Mengatasi tantangan bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
4. **Inovasi Daerah:** Mendorong inovasi berkelanjutan di seluruh level pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan pembangunan.
5. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memperbaiki sistem perizinan berusaha untuk menarik investasi dan menghilangkan hambatan birokrasi.
6. **Pengendalian Penduduk:** Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mengelola risiko ketergantungan pada penduduk usia non-produktif.
7. **Pemberdayaan UMKM dan Koperasi:** Melibatkan UMKM dan koperasi dalam menarik investasi daerah.
8. **Digitalisasi Perizinan:** Menerapkan digitalisasi perizinan berusaha untuk kemudahan berusaha.
9. **Penguatan Kolaborasi:** Memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam menarik investasi.
10. **Pemanfaatan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan investasi dan hilirisasi.

Tujuan dan sasaran BKPM untuk periode 2025-2029 adalah untuk meningkatkan daya saing penanaman modal dan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang unggul. BKPM juga bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelayanan publik yang prima dalam bidang investasi.

Secara lebih rinci, tujuan dan sasaran BKPM untuk periode 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan:

- **Meningkatkan daya saing penanaman modal:**

Ini berarti BKPM akan berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif bagi investor, baik domestik maupun asing.

- **Menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang unggul:**
BKPM akan fokus pada promosi investasi, fasilitasi investasi, dan peningkatan kualitas pelayanan investasi untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia.
- **Mewujudkan tata kelola dan penguatan kelembagaan:**
BKPM akan berupaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan investasi, serta memperkuat kelembagaan BKPM itu sendiri.

Sasaran:

- **Meningkatnya realisasi investasi:**
BKPM akan berupaya mencapai target investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik investasi domestik maupun asing.
- **Meningkatnya kualitas investasi:**
BKPM akan mendorong investasi yang berkualitas, seperti investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan ramah lingkungan.
- **Meningkatnya persebaran investasi:**
BKPM akan berupaya mendorong investasi yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terpusat di beberapa daerah saja.
- **Meningkatnya kemudahan berusaha:**
BKPM akan terus berupaya mempermudah proses perizinan dan pelayanan investasi, serta mengurangi hambatan birokrasi.
- **Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia:**
BKPM akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang investasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lainnya.
Dengan mencapai tujuan dan sasaran tersebut, BKPM berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Timur untuk periode 2025-2029 akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan sosial, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta

pemantapan birokrasi yang berintegritas. Selain itu, akan ada penekanan pada peningkatan kerjasama desa, pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-2029:

Tujuan:

- **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter:** Melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, derajat kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas olahraga.
- **Mewujudkan pemerataan layanan dan perlindungan sosial:** Dengan memastikan bahwa semua masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan sosial dan perlindungan.
- **Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja:** Mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja.
- **Memantapkan birokrasi yang berintegritas dan dinamis:** Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bersih dari korupsi.
- **Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial:** Menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan demokratis.

Sasaran:

- **Peningkatan kualitas pelayanan publik:**
Memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- **Pembangunan infrastruktur:**
Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- **Peningkatan mutu pendidikan:**
Meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

- **Penguatan kesejahteraan masyarakat:**
Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekonomi, sosial, dan kesehatan.
- **Peningkatan kerjasama desa:**
Mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antara desa dan pihak ketiga, serta antar desa.
- **Penguatan ketahanan keluarga:**
Meningkatkan ketahanan keluarga melalui berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- **Peningkatan budaya literasi masyarakat:**
Mendorong minat baca dan tulis masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

Fokus Pembangunan	Pemerintah Pusat (Nasional)	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten Madiun
Visi & Agenda Utama	Visi Asta Cita (Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045)	Pilar Jatim Sejahtera dan Jatim Sehat	Semangat Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera)
Kesehatan & SDM	Program Makan Bergizi Gratis dan Layanan Kesehatan Gratis	Intervensi stunting (sensitif & spesifik) dan penguatan layanan medis regional	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan penurunan angka stunting lokal

Sosial & Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan ekstrem dan jaminan sosial nasional	Program PKH Plus (lansia/rentan) dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (Rutilahu)	Penurunan persentase kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Ekonomi & Kerja	Target akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja	Penguatan sentra ekonomi regional dan penataan kawasan permukiman	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pemberdayaan usaha lokal
Infrastruktur & Lingkungan	Keamanan air, energi, pangan, dan ekonomi hijau	Konektivitas antarwilayah dan penanganan kawasan kumuh	Pembangunan infrastruktur merata dan pengendalian emisi gas rumah kaca

3.2. Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 mengacu kepada tujuan yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Tujuan 3: Terwujudnya Daya Saing Perekonomian Daerah pada RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2025-2029, yaitu fokus pada peningkatan realisasi investasi yang mencerminkan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan pro-investasi, seperti penyederhanaan perizinan, pengembangan kawasan industri terpadu, dan pemberian insentif bagi investasi padat. Tujuan meningkatnya investasi daerah diukur melalui 3 indikator kinerja, yaitu

- ☐ Nilai Realisasi Investasi
- ☐ ICOR (Indeks)
- ☐ Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2026
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah		Nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi diperoleh dari data LKPM. LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala	3 Triliun Rupiah
			ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	Membandingkan jumlah tambahan modal (investasi) dengan jumlah tambahan output (pendapatan) dalam periode waktu tertentu $ICOR = \Delta K / \Delta Y$. ΔK adalah penambahan stok modal (investasi) dan ΔY adalah penambahan output atau pendapatan	4,3 Indeks
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	menjumlahkan total perolehan aset tetap (bangunan, mesin, peralatan, dll.) selama periode tertentu, kemudian mengurangi total pelepasan aset tetap (misalnya penjualan aset) yang terjadi pada periode yang sama	32,85 %PDRB
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Yang Berkelanjutan di Daerah	Pertumbuhan jumlah pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha tahun N - (N-1) dibagi jumlah pelaku usaha (N-1) dikali 100	15 %
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	mengalikan rata-rata tertimbang nilai unsur pelayanan dengan nilai dasar 25	4,25 Indeks

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai unit pelayanant publik DPMPTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2026 sebagai upaya untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2026 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, yang terdiri atas 6 program, kegiatan sub kegiatan, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Renja
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026

Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18				PENANAMAN MODAL
2.18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.18.	01	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.	01	2.06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.	01	2.06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.18.	01	2.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.18.	01	2.06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.18.	01	2.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.18.	01	2.06.	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.18.	1	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.18.	01	2.07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	01	2.07.	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.	01	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.	01	2.08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.18.	01	2.08.	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.18.	01	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
2.18.	01	2.09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.18.	01	2.09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.18.	01	2.09.	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.18.	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.	02.	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.	02.	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
2.18.	02.	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.	02.	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
2.18.	03.			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.	03.	2.01.		Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota
2.18.	03.	2.01.	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota
2.18.	04.			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2.18.	04.	2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
2.18.	04.	2.01.	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
2.18.	04.	2.01.	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2.18.	04.	2.01.	0007	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
2.18.	05.			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.	05.	2.01.		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota
2.18.	05.	2.01.	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2.18.	05.	2.01.	0006	Pengawasan Penanaman Modal
2.18.	06.			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL
2.18.	06.	2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.	06.	2.01.	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3. 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
DPMPTSP Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.011.558.942,00				6.199.146.589,67
2.18	PENANAMAN MODAL				7.011.558.942,00				6.199.146.589,67
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,3 (A) Nilai	6.161.558.942,00			84,5 (A)	4.325.518.929,00
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		87,3 (A) Nilai				87,5 (A)	
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		79,5 Nilai				80	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		95%	0,00			93%	1.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	0,00	-		25 Laporan	1.000.000,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	4.552.248.638,00			100%	3.075.518.929,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	32 orang/bulan	4.552.248.638,00	DAU,		31 orang	3.075.518.929,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi Jumlah laporan layanan administrasi dan pengelolaan kepegawaian yang disusun		100 %	20.000.000,00			5 Laporan	70.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Madiun	4 Orng	20.000.000,00	PBH		40 Orang	50.000.000,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Madiun	-	-	-		1 Paket	20.000.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum Jumlah laporan penyediaan layanan administrasi umum dan kebutuhan rumah tangga yang dilaksanakan		95%	421.917.000,00			2 Laporan	324.000.000,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	2 Paket	15.000.000,00	PAD		2 Paket	20.000.000,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	150.000.000,00	PBH		5 Paket	90.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	2 Paket	25.000.000,00	PBH		2 Paket	15.000.000,00
22.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	20.000.000,00	PBH		5 Paket	14.000.000,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Madiun	-	-	-		12 Dokumen	1.000.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	200 Laporan	196.917.000,0	PAD		150 Laporan	170.000.000,00
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	5 Dokumen	15.000.000,00	PBH		5 Dokumen	14.000.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan Jumlah laporan pengadaan barang		100%	196.995.198,00			1 Laporan	60.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		milik daerah yang dilaksanakan							
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	10 unit	87.684.894,00	PAD DBH		4 unit	60.000.000,00
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	1 unit	109.310.304,00	DAU			0
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan		100%	750.398.106,00			4 Laporan	710.000.000,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	263.702.282,43	PAD		12 laporan	250.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	486.695.823,57	PAD		12 laporan	460.000.000,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan		95%	270.000.000,00			4 Laporan	85.000.000,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	15 unit	165.000.000,00	PBH		12 unit	35.000.000,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	75 unit	55.000.000,00	PBH		80 unit	25.000.000,00
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Madiun	1 unit	50.000.000,00	DAU		1 unit	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha		14500 Perusahaan	113.413.000,00			94 Nilai	632.824.076,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan Jumlah penetapan pemberian fasilitas/insentif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku		85%	37.863.000,00			2 dokumen	632.824.076,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	7.893.000,00	DBH		1 dokumen	232.824.076,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Madiun	10 dokumen	29.970.000,00	DBH		3 dokumen	400.000.000,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan		1 Proyek	75.550.000,00				0,00
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	1 Dokumen	75.550.000,00	DBH			0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru Minat Investasi		1000 Perusahaan	149.308.000,00			13 Minat	305.237.368,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal Persentase Fasilitasi Minat Investasi yang dilaksanakan		13 Minat	149.308.000,00			100%	305.237.368,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 dokumen	149.308.000,00	DBH		3dokumen	255.237.368,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Madiun	-	0	-		1 dokumen	50.000.000,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perizinan dan Non Perizinan		90 Nilai	197.279.000,00			91,5 Nilai	726.853.941,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		85%	197.279.000,00			85%	726.853.941,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 Dokumen	7.560.000,00	DBH		4 Dokumen	200.000.000,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	2500 Pelaku Usaha	169.719.000,00	DBH		2500 Pelaku Usaha	416.853.941,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	1200 Pelaku Usaha	20.000.000,00	DBH		1250 Pelaku Usaha	110.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Persentase pelaporan LKPM oleh pelaku usaha sesuai peraturan yang berlaku		160 Perusahaan	250.000.000,00			63%	133.297.999,67
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Fasilitasi permasalahan perusahaan yang terlaksana Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal		135 Pelaku usaha	250.000.000,00			525 Pelaku Usaha	133.297.999,67
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	10 Kegiatan Usaha	66.298.000,00	DAU		10 Kegiatan Usaha	62.444.058,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	15 Kegiatan Usaha	183.702.000,00	DAU		20 Kegiatan Usaha	70.853.941,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	Kab. Madiun	88	140.000.000,00			87,5	75.414.276,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aksesibilitas pemanfaatan data informasi oleh pengguna layanan Persentase pengelolaan dan pelayanan data informasi urusan penanaman modal yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Madiun	2000 kali	140.000.000,00			100	75.414.276,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Madiun	15 dokumen	140.000.000,00	DBH		15 dokumen	75.414.276,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2026 dan perkiraan Tahun 2027, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2026 yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 7 (Tujuh) kegiatan 18 (delapan belas) sub kegiatan dan program teknis memiliki 6 (Enam) kegiatan dan 11 (Sebelas) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.011.558.942,00	
2.18	PENANAMAN MODAL				7.011.558.942,00	
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84,3 (A) Nilai	6.161.558.942,00	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		87,3 (A) Nilai		
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		79,5 Nilai		
2.18.12.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu		95%	0,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	25 Laporan	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	4.552.248.638,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	32 orang/bulan	4.552.248.638,00	DAU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi/ perlengkapan kepegawaian yang dipenuhi		100 %	20.000.000,00	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Madiun	4 Orang	20.000.000,00	PBH
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	421.917.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	2 Paket	15.000.000,00	PAD
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	5 Paket	150.000.000,00	PBH
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	2 Paket	25.000.000,00	PBH
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Madiun	4 Paket	20.000.000,00	PBH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	200 Laporan	196.917.000,00	PAD
2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Madiun	5 Dokumen	15.000.000,00	PBH
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	196.995.198,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	10 unit	87.684.894,00	PAD DBH
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Madiun	1 unit	109.310.304,00	DAU
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	750.398.106,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	263.702.282,43	PAD
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Madiun	12 laporan	486.695.823,57	PAD,
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		95%	220.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Madiun	12 unit	165.000.000,00	PBH
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Madiun	75 unit	55.000.000,00	PBH
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Madiun	1 unit	50.000.000,00	PBH
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor		14500 Perusahaan	113.413.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha yang dilaksanakan		90%	37.863.000,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	7.893.000,00	DBH
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Madiun	10 dokumen	29.970.000,00	DBH
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi yang siap ditawarkan		1 proyek	75.550.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kab. Madiun	1 dokumen	75.550.000,00	DBH
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor baru		1000 Perusahaan	149.308.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Minat Penanaman Modal		13 Minat	149.308.000,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Madiun	-	-	-
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	3 dokumen	149.308.000,00	DBH
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai SKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		90 Nilai	197.279.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		85%	197.279.000,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	2 Dokumen	7.560.000,00	DBH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	2500 Pelaku Usaha	169.719.000,00	DBH
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	1200 Pelaku usaha	20.000.000,00	DBH
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)		160 Perusahaan	250.000.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pengendalian terhadap kegiatan usahanya		135 pelaku usaha	250.000.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Madiun	10 kegiatan usaha	66.298.000,00	DAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Madiun	15 Kegiatan Usaha	183.702.000,00	DAU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi		88 Nilai	140.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian layanan data informasi yang dilaksanakan	Kab. Madiun	20000 kali	140.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		15 dokumen	140.000.000,00	DBH

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2026.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2026 ini serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Madiun.

Madiun, 21 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, M.H

Pemula Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003